



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

12 – 15 Mei 2023



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	TANGGAL	Jumat, 12 Mei 2023	+
	MEDIA	https://www.antaranews.com/berita/3535428/kementerian-pupr-targetkan-hunian-asn-di-ikn-mulai-konstruksi-juli	
	JUDUL	Kementerian PUPR Targetkan Hunian ASN Di IKN Mulai Konstruksi Juli	
	NARASUMBER	Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga	
	RESUME	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan pembangunan sebanyak 47 <i>tower</i> hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimukai pada Juli 2023. Pembangunan hunian ASN di IKN dengan menggunakan APBN disiapkan sebanyak 47 <i>tower</i> dengan nilai sekitar Rp9,4 triliun. Dalam kesempatan sama, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan mengenai konsep <i>transit oriented development</i> atau TOD yang sudah dimasukkan dalam desai kota IKN.	
2	TANGGAL	Sabtu, 13 Mei 2023	+
	MEDIA	https://kaltim.tribunnews.com/2023/05/13/percepat-pembangunan-infrastruktur-di-ikn-nusantara-pemerintah-terbitkan-3-aturan	
	JUDUL	Percepat Pembangunan Infrastruktur di IKN Nusantara, Pemerintah Terbitkan 3 Aturan	
	NARASUMBER	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto	



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

15 / 05 / 2023

| Analisis Pemberitaan Media Online

RESUME

3 lembaga pemerintah menerbitkan aturan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di [Ibu Kota Nusantara](#) atau [IKN](#) Nusantara, [Kalimantan Timur](#). 3 lembaga tersebut yakni [Kemenkeu](#), Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Ketiganya melakukan sosialisasi tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus [Ibu Kota Nusantara](#). ketiga aturan ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di [Ibu Kota Nusantara](#). Kedua, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha di [Ibu Kota Nusantara](#). Ketiga adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Di [Ibu Kota Nusantara](#).



12 / 05 / 2023

Sumber: antaranews.com

Kementerian PUPR Targetkan Hunian ASN Di IKN Mulai Konstruksi Juli

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) menargetkan pembangunan sebanyak 47 *tower* hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimukai pada Juli 2023.

“Ini sedang dalam proses tender, dan kita harapkan bisa mulai (kontruksi) sekitar Juli 2023 kalau prosesnya lancar,” ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Danis menjelaskan bahwa pembangunan hunian ASN di IKN ada yang menggunakan skema APBN dan ada juga yang dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Untuk perumahan ASN dengan skema KPBU sedang diproses di Otorita IKN (OIKN). Sedangkan untuk Kementerian PUPR lebih kepada eksekusi pembangunan infrastruktur IKN yang menggunakan dana APBN,” katanya.

Pembangunan hunian ASN di IKN dengan menggunakan APBN disiapkan sebanyak 47 *tower* dengan nilai sekitar Rp9,4 triliun.

Dalam kesempatan sama, Danis juga menyampaikan mengenai konsep *transit*

oriented development atau TOD yang sudah dimasukkan dalam desai kota IKN.

“Prinsipnya di IKN da moda-moda jalan, moda kendaraan dan moda rel kereta, di salah satu titik ada moda TOD jadi bisa berpindah. Hal ini sudah bis akita masukkan ke dalam desain kota atau *urban design*,” katanya.

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN saat ini berfokus terlebih dahulu pada pembangunan infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor kementerian, infrastruktur air bersih, jalan, dan sebagainya sampai dengan tahun depan.

Kendati demikian, konsep TOD pastinya diterapkan seiring berjalannya pembangunan IKN Nusantara sampai dengan tahun 2045.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ingin memepercepat pembangunan rumah susun hunian pegawai pemerintahan Kawasan inti IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Rumahn susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN, semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas dan [aling kecil luas unit rumah susun ASN sekitar 98 meter persegi. Rumah susun



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

12 / 05 / 2023

| sumber: antaranews.com

untuk hunian ASN, sekelas apartemen dengan 47 *tower* dan tiap Menara rata-rata dibangun 12 lantai.

Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintah sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, lanjut dia, jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.

Selain 31 menara untuk hunian ASN, Sembilan Menara untuk Paspampres, empat Menara untuk TNI/Polri dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga Menara

<https://www.antaranews.com/berita/3535428/kementerian-pupr-targetkan-hunian-asn-di-ikn-mulai-konstruksi-juli>



13 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

Percepat Pembangunan Infrastruktur di IKN Nusantara, Pemerintah Terbitkan 3 Aturan

Penulis: Rafan Arif Dwinanto
Editor: Sandrio

TRIBUNKALTIM.CO - 3 lembaga pemerintah menerbitkan aturan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di [Ibu Kota Nusantara](#) atau [IKN](#) Nusantara, [Kalimantan Timur](#).

3 lembaga tersebut yakni [Kemenkeu](#), Bappenas dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP).

Ketiganya melakukan sosialisasi tiga peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus [Ibu Kota Nusantara](#).

Dilansir dari [Kontan](#), ketiga aturan ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220 Tahun 2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur Di [Ibu Kota Nusantara](#).

Kedua, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha di [Ibu Kota Nusantara](#).

Ketiga adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Di [Ibu Kota Nusantara](#).

Peraturan pelaksana ini diharapkan dapat mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di [Ibu Kota Nusantara](#) dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Penerbitan peraturan pelaksana ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Pidato Kenegaraan, yang menyampaikan bahwa Kawasan inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi.

Pendanaan penyediaan infrastruktur [IKN](#) dapat berasal dari APBN dan di luar APBN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang [Ibu Kota Nusantara](#), serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2022.

Sumber pendanaan dari APBN lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan kompleks pemerintahan utama, serta menjadi katalis untuk menarik dana swasta dalam pembangunan [IKN](#).

Sumber pendanaan dari luar APBN perlu dioptimalkan baik melalui penerapan skema Kerjasama Pemerintah dengan



13 / 05 / 2023

sumber: tribunnews.com

Badan Usaha (KPBU), maupun skema pembiayaan kreatif (creative financing).

Skema tersebut perlu memaksimalkan peran serta sektor swasta dan menarik sumber-sumber dana non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di [IKN](#).

Dalam hal ini, [Kemenkeu](#) menetapkan aturan yang dapat memberikan keyakinan kepada investor, bahwa investasi di [IKN](#) merupakan pilihan yang menarik.

“Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan [IKN](#) harus disertai dengan tata kelola yang baik termasuk dalam memberikan kepastian nilai imbal hasil atas investasi yang dilakukan secara akuntabel, fair dan transparan,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko [Kemenkeu](#) Suminto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/2).

Upaya dan dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian bagi investor dilakukan melalui penetapan PMK Nomor 220/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha serta Pembiayaan Kreatif dalam rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di [Ibu Kota Nusantara](#).

Dukungan yang dapat disediakan dan diberikan diantaranya berupa dukungan fasilitas penyiapan dan pelaksanaan transaksi proyek, penjaminan pemerintah, pemrosesan dokumen skema pengembalian investasi melalui ketersediaan layanan (availability payment), pemanfaatan BMN, dukungan kelayakan yang disertai dengan inoveasi penyederhanaan tahapan, serta memberikan penyedia pembiayaan infrastruktur.

<https://kaltim.tribunnews.com/2023/05/13/percepat-pembangunan-infrastruktur-di-ikn-nusantara-pemerintah-terbitkan-3-aturan>